Kementerian Hukum Republik Indonesia **Inspektorat Jenderal**	**Nomor SOPAP:**	ITJ-OT.02.02-65
	Tanggal Pembuatan:	13 Juni 2025
	Tanggal Revisi:	13 Juni 2025
	Tanggal Efektif:	13 Juni 2025
	Disahkan Oleh:	Inspektur Jenderal #KUMHAMPASTI Ditandatangani secara elektronik oleh : Dr. Reynhard Silitonga
	Nama SOPAP:	Pengajuan Ijin Prakarsa Penyusunan Peraturan Menteri Hukum

Dasar Hukum:	**Kualifikasi Pelaksana:**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 4. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrast Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Bisnis Proses. 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 7. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum .	1. Mengetahui dan memahami tugas dan fungsr Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan Memahami ketentuan penyusunan Proses Bisnis (PROBIS). 2. Memahami ketentuan penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOPAP). 3. Memiliki kemampuan menjalin koordinasi yang baik dengan berbagai pihak. 4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer. 5. Memiliki kemampuan pengolahan data.
Keterkaitan:	**Peralatan/Perlengkapan:**
	1. Peraturan Perundang-undangan 2. Komputer, Printer dan Scanner 3. Jaringan Internet
Peringatan:	**Pencatatan dan Pendaftaran:**
Apabila PROBIS dan SOP ini tidak ditetapkan maka organisasi tidak me miliki standar yang baku dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.	Di simpan sebagai data secara elektronik dan manual.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

SOP PENGAJUAN IJIN PRAKARSA PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI HUKUM
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM

NO.	KEGIATAN	MUTU BAKU							KETERANGAN
		Sekretaris Inspektorat Jenderal	Kepala Bagian Program Perencanaan dan Pelaporan	Tim KRB	Inspektur Jenderal	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menugaskan Kepala Bagian Program dan Pelaporan untuk mempersiapkan konsep pengajuan Ijin Prakarsa Peraturan Menteri Hukum.					Agenda kerja	15 menit	Disposisi	
2.	Memerintahkan Tim KRB untuk membuat konsep Surat Pengajuan Ijin Prakarsa Peraturan Menteri Hukum.					Disposisi	15 menit	Disposisi	
3.	Menyusun konsep surat pengajuan Ijin Prakarsa Peraturan Menteri Hukum dan menyerahkan kepada Kepala Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan.					Bahan Konsep Surat Pengajuan Ijin Prakarsa Peraturan Menteri Hukum	2 hari	Konsep Surat Pengajuan Ijin Prakarsa Peraturan Menteri Hukum, Disposisi	lengkap dengan draft awal dan timeline penyusunan Rpermenkum
4.	Memeriksa konsep surat pengajuan Ijin Prakarsa Peraturan Menteri Hukum. Jika setuju menyampaikan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal. Jika tidak setuju menyerahkan kepada Tim KRB untuk diperbaiki.		T Y			Konsep Surat Pengajuan Ijin Prakarsa Peraturan Menteri Hukum	1 hari	Konsep Surat Pengajuan Ijin Prakarsa Peraturan Menteri Hukum, Disposisi	
5.	Memeriksa konsep surat pengajuan Ijin Prakarsa Peraturan Menteri Hukum. Jika setuju menyampaikan kepada Inspektur Jenderal. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Kepala Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan untuk diperbaiki.	T Y				Konsep Surat Pengajuan Ijin Prakarsa Peraturan Menteri Hukum	1 hari	Konsep Surat Pengajuan Ijin Prakarsa Peraturan Menteri Hukum, Disposisi	
6.	Memeriksa konsep surat pengajuan Ijin Prakarsa Peraturan Menteri Hukum. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk diperbaiki.				T Y	Konsep Surat Pengajuan Ijin Prakarsa Peraturan Menteri Hukum	1 hari	Surat Pengajuan Ijin Prakarsa Peraturan Menteri Hukum, Disposisi	
7.	Menyerahkan surat pengajuan Ijin Prakarsa Peraturan Menteri Hukum kepada Kepala Perencanaan Program dan Pelaporan untuk dikirim ke Sekretariat Jenderal serta didokumentasikan.					Surat Pengajuan Ijin Prakarsa Peraturan Menteri Hukum	15 menit	Disposisi	
8.	Menyerahkan surat pengajuan Ijin Prakarsa Peraturan Menteri Hukum kepada Tim KRB untuk dikirim ke Sekretariat Jenderal serta didokumentasikan.					Surat Pengajuan Ijin Prakarsa Peraturan Menteri Hukum	15 menit	Disposisi	
9.	Mengirim dan mendokumentasikan surat pengajuan Ijin Prakarsa Peraturan Menteri Hukum.					Surat Pengajuan Ijin Prakarsa Peraturan Menteri Hukum	15 menit	Surat Pengajuan Ijin Prakarsa Peraturan Menteri Hukum, Bukti Dokumentasi	

